

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak bagi umat manusia untuk dinikmati, oleh karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan semua makhluk hidup.

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Menurut Otto Soemarwo, “Lingkungan adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”¹.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, terdapat pengaturan hukum terkait lingkungan hidup yang diletakan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal (28) H poin 1 Undang- Undang Dasar Tahun 1945, adapun bunyi pasal itu adalah: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

¹N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. 2004. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hlm 4

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”².

Perubahan paradigma di Indonesia diawali dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup, yang memberikan pedoman sehingga muncul pemahaman yang jelas dan seragam antara para pemangku kepentingan mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang ini kemudian berkembang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan arahan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Kebijakan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keluarnya Undang-Undang ini adalah karena kerusakan lingkungan hidup makin meningkat, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan³.

Masalah lingkungan dapat diidentifikasi menjadi 4 golongan yaitu :

1. Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan
2. Masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan
3. Masalah lingkungan yang bersumber pada kekotoran
4. Masalah lingkungan yang bersumber pada kebijaksanaan

²Tohari. 09/24/2016. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. www.hukumpedia.com. Diakses tanggal 06 Maret 2017.

³Hartuti Purnaweni. 2014. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol.12. Hal 54. Program Studi Ilmu Lingkungan. Pascasarjana UNDIP

Ke empat golongan tersebut saling berhubungan sangat erat satu sama lain dan saling mempengaruhi secara permanen⁴.

Perusakan lingkungan banyak dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah industri. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya⁵.

Upaya pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sesungguhnya sudah lama dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia yaitu, sejak Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini setidaknya dikenal sebagai gerakan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup secara internasional, juga mendorong negara-negara di berbagai kawasan untuk memperteguh komitmen politiknya, yaitu membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup⁶, misalnya pencemaran laut, pencemaran lapisan ozon, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim dunia. Prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan internasional, seperti tetangga yang baik, mengikat setiap negara sepanjang negara yang bersangkutan tidak menunjukkan perlawanannya atau penolakannya secara konsisten dalam waktu yang lama⁷.

Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menimbulkan munculnya berbagai masalah lingkungan hidup, yang sekarang ini sudah menjadi masalah nasional, dengan semakin meningkatnya kegiatan industri mempunyai kecenderungan dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan apabila tidak dikendalikan secara proporsional, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan industri memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan air laut akibat

⁴M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. 2000. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hlm 4

⁵P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. 2002. Jakarta. Penerbit Pt Rineka Cipta. Hlm 3

⁶Bethan. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. 2008. Bandung. Penerbit P.T.Alumni. Hlm 30

⁷Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. 2009.Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hlm 38

dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioksida dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat⁸.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Oleh karenanya setiap pembangunan yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup, dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sangat dirasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan masyarakat di sekitarnya. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik-pabrik.

Pengelolaan limbah industri baik cair maupun padat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan mempunyai prinsip, bahwa limbah tidak boleh terakumulasi di alam sehingga mengganggu siklus materi dan nutrien, kemudian pembuangan limbah dibatasi pada tingkat yang tidak melebihi daya dukung lingkungan untuk menyerap pencemaran dan sistem tertutup penggunaan materi seperti daur ulang dan pengomposan harus dimaksimalkan.

Dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan atau pabrik-pabrik terhadap lingkungannya semakin meningkat, karena perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya akan banyak menemui berbagai kendala seperti seringkali masyarakat sekitar berunjuk rasa, bahkan ada perusahaan yang terpaksa

⁸M. Hamdan. *Op.cit.* Hlm 9

ditutup oleh pihak yang berwenang karena perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya⁹.

Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Perseroan wajib turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga Perseroan menempatkan komitmen terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial sebagai hal yang utama dan tidak terpisahkan dari kegiatan operasi Perseroan. Untuk mewujudkannya, Perseroan melengkapi kegiatan operasi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Tujuannya adalah untuk memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan operasi, mengevaluasi serta mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi, dengan demikian, pelaksana kegiatan memiliki panduan mengelola dampak lingkungan di setiap lokasi operasi Perseroan¹⁰.

Selain itu, untuk menunjukan peran Perseroan sebagai warga yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, Perseroan mempunyai 5 pokok kebijakan lingkungan sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

⁹AMFG. *Tanggung Jawab Terhadap lingkungan*. <http://www.amfg.co.id>. Diakses tanggal 14 September 2017

¹⁰Ibid

1. Melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terintegrasi.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan.
3. Melakukan langkah-langkah pengurangan dampak lingkungan dan mencegah pencemaran.
4. Mengembangkan produk, teknologi, pelayanan dan fasilitas yang ramah lingkungan.
5. Berkomunikasi secara aktif mengenai aktifitas lingkungan dengan para pemangku kepentingan

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹¹.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh perusahaan dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Karena itu setiap pembangunan yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah limbah atau sampah yang dihasilkan oleh perusahaan

¹¹Ibid

atau pabrik-pabrik, berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya”, dalam hal ini banyak sampah maupun limbah yang dihasilkan di sekitar kawasan industri yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan di Lahan pertanian di Rancaekek, Jawa Barat, karena ulah pabrik yang membuang limbah sembarangan, PT Kurnia Tunggal Nugraha (KTN) dan PT Era Sakti Wira Forestama (ESWF) yang diduga membuang limbah di sungai Batanghari Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.¹²

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur terkait lingkungan hidup tersebut, maka diharapkan setiap orang dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar, agar lingkungan hidup tidak tercemar dan/atau tidak terjadi kerusakan, namun di Indonesia banyak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik-pabrik, untuk itu limbah harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan hidup, jika limbah dapat dikelola dengan baik, maka masyarakat sekitarpun bisa menerima keberadaan perusahaan dengan baik, karena tidak merusak lingkungan sekitar, sehingga harapannya keberlangsungan usaha perusahaan dapat terjamin.

¹²Berita Satu. 2015. *Dua Industri Sawit Buang Limbah Ke Sungai Batanghari*. <http://www.beritasatu.com> diakses tanggal 07 maret 2017

Kenyataannya di PTPN X PG Lestari yang terletak di Kabupaten Nganjuk, tidak semua elemen masyarakat bisa menerima niat baik PTPN X PG Lestari dalam mewujudkan program *Corporate Social Responsibility* dan bina lingkungan yang diserukan oleh pemerintah, karena masyarakat masih merasakan dampak buruk dari limbah produksi/penggilingan tebu.

Limbah yang dihasilkan dari produksi/penggilingan tebu berupa:

1. Limbah cair

Limbah cair merupakan hasil samping dari proses pengolahan gula maupun bocoran dari pipa yang sudah tidak dapat terpakai lagi.

2. Limbah padat

- a. Abu ketel yang merupakan sisa hasil pembakaran ampas tebu di dapur ketel.
- b. Blotong yang merupakan limbah hasil penapisan dalam proses pemurnian nira.

Beberapa limbah hasil produksi ini sangat dikeluhkan oleh warga khususnya warga Desa Patianrowo karena warga masih merasakan akibat buruk limbah produksi, diantaranya adalah bau tidak sedap pada saat perusahaan tidak sedang giling tebu (melakukan proses produksi), dan abu dari cerobong pabrik masih beterbangan di pemukiman warga¹³.

Untuk itu pengelolaan dan pembuangan limbah yang berasal dari perusahaan harus mendapat perhatian serius sebagai bagian dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap

¹³Ambarwati. *Implementasi Akuntansi Lingkungan Dalam Pelaksanaan Csr Pada Pabrik Gula Lestari*. www.jurnal.stienganjuk.ac.id. diakses tanggal 28 Agustus 2017

Pengelolaan Limbah Produksi Pada PTPN X PG Lestari Dalam Rangka Mengatasi Dampak Limbah Produksi Di Lingkungan PTPN X PG Lestari”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG Lestari ditinjau dari Psal 54 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH ?
2. Apa dampak limbah produksi di PTPN X PG Lestari terhadap lingkungan hidup?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG Lestari terhadap lingkungan hidup ditinjau dari Pasal 53 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG Lestari ditinjau dari Psal 54 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH .
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak limbah produksi di PTPN X PG Lestari terhadap lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG Lestari terhadap lingkungan hidup ditinjau dari Pasal 53 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG Lestari dalam rangka mengatasi dampak limbah pada lingkungan PTPN X PG Lestari yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian oleh kalangan akademisi.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan guna menambah wawasan bagi penulis, dan sebagai prasyarat akademis untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum.

b. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat dalam hal pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG Lestari dalam rangka untuk mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan hidup.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi PTPN X PG Lestari, dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan masukan serta ilmu dalam hal pengelolaan limbah produksi dalam rangka untuk mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan hidup.

2. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai salah satu *Stakeholder* terkait upaya

untuk mengatasi dampak pengelolaan limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan hidup.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu dimana penelitian ini melihat kasus yang terjadi pada perusahaan yang berdampak pada lingkungan hidup dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku serta literature-literature hukum yang berkaitan dengan kasus penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap kasus yang diteliti. Lokasi yang dipilih untuk dilakukan penelitian yaitu di PTPN X PG Lestari yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri, PTPN X PG Lestari ini terletak di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, peneliti memilih melakukan penelitian di sini karena tidak semua elemen masyarakat di kecamatan Patianrowo ini menerima niat baik PTPN X PG Lestari dalam mewujudkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diserukan oleh pemerintah, karena masyarakat masih merasakan dampak buruk dari limbah produksi/penggilingan tebu, diantaranya adalah bau menyengat pada saat perusahaan tidak sedang giling tebu (melakukan proses produksi), Selain itu abu dari cerobong pabrik masih beterbangan di pemukiman warga, dan hal ini sangat dikeluhkan oleh warga, khususnya Desa Ngrombot dan Desa Patianrowo.

3. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama yang di dapatkan melalui wawancara ke pihak PTPN X PG.Lestari tentang bagaimana pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG.Lestari, dan bagaimana upaya dalam rangka mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan dan wawancara kepada Tokoh masyarakat terkait dampak limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan serta upaya perusahaan untuk mengatasi dampak limbah tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber kedua seperti studi kepustakaan dari literatur-literatur seperti jurnal, penelitian hukum sebelumnya, dokumen hukum termasuk undang-undang yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah N0. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

c. Data tersier

Data tersier adalah data mengenai pengertian baku atau istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

d. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a). Wawancara yaitu, suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan pihak terkait yang dianggap mengetahui banyak terkait permasalahan dalam penulisan ini, dalam penelitian ini yang akan saya wawancara adalah Bapak Reza selaku Kepala Bagian Pengolahan Limbah, Bapak Budianto selaku Sekretaris Desa Patianrowo, Bapak Suhaily Karyawan Pabrik dan beberapa warga Desa Patianrowo.
- b). Observasi yaitu, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat pada penulisan ini, dalam hal ini yang saya amati secara langsung yaitu lingkungan hidup sekitar pabrik, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- c). Studi kepustakaan, yaitu peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*¹⁴.
- d). Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa gambar dari penelitian yang dilakukan di lingkungan PTPN X PG.Lestari ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal ini yang berkenan dengan proses penelitian yaitu Undang-undang terkait lingkungan hidup dan limbah.
- e). Analisa data adalah seluruh data terkumpul baik primer, skunder, maupun tersier dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian di ambil kesimpulan yang Relevan, sehingga mendapatkan data yang akurat untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana Pengelolaan limbah

¹⁴ Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rajawali Pers. Hlm 114

produksi pada PTPN X PG.Lestari, dan upaya untuk mengatasi dampak limbah produksi di PTPN X PG.Lestari terhadap lingkungan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terhadap isi skripsi yang di buat oleh penulis, maka secara garis besar sistematika skripsi terdiri dari beberapa bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan dan menguraikan mengenai garis-garis besar permasalahan dari skripsi ini, diharapkan akan mengetahui tentang permasalahan yang telah terjadi terkait dengan pengelolaan limbah produksi pada PTPN X PG Lestari dalam rangka mengatasi dampak limbah produksi di lingkungan PTPN X PG.Lestari, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tentang kajian teoritis yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup berupa pengertian lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, jenis-jenis lingkungan hidup, dan fungsi lingkungan hidup, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas berupa pengertian perseroan terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan Tinjauan Umum Tentang Limbah berupa pengertian limbah,

jenis-jenis limbah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah, pengaruh limbah terhadap lingkungan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan menerapkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menganalisa permasalahan yang di angkat oleh penulis tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran terkait permasalahan yang ada.

